

INDIKATOR PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: DITINJAU DARI KETIDAKSESUAIAN INDIKATOR PENGUKURAN PEMBANGUNAN DESA

Sonny Harry B. Harmadi
Udin Suchaini
Ardi Adji

FEBRUARI 2020

INDIKATOR PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: DITINJAU DARI KETIDAKSESUAIAN INDIKATOR PENGUKURAN PEMBANGUNAN DESA

Sonny Harry B. Harmadi¹, Udin Suchaini², Ardi Adji³

TNP2K Working Paper 51 - 2020
Februari 2020

Seri Kertas Kerja TNP2K menyajikan temuan-temuan dari pekerjaan yang sedang berjalan untuk mendorong diskusi dan pertukaran ide-ide dalam bidang kemiskinan, perlindungan sosial dan isu-isu pembangunan.

Temuan, penafsiran dan kesimpulan dalam kertas kerja ini merupakan pandangan penulis dan bukan mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA.

Dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan nonkomersial.

Saran pengutipan: Suchaini, U., Harmadi, S.H.B., Adji, A. Indikator Pembangunan Desa di Indonesia: Ditinjau Dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa. TNP2K Working Paper 51/2020. Jakarta, Indonesia.

Untuk meminta salinan laporan atau keterangan lebih lanjut, silakan hubungi TNP2K (info@tnp2k.go.id). Kertas kerja ini juga tersedia di situs web TNP2K (www.tnp2k.go.id).

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kantor Sekretariat Wakil Presiden
Jl. Kebon Sirih Raya No.14, Jakarta Pusat, 10110

¹ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sonny_harmadi@yahoo.com

² Badan Pusat Statistik, udin@bps.go.id

³ Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, win.djeroh@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menguraikan capaian Indikator Pembangunan Desa tahun 2014 dan 2018 setelah pemerintah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp250 triliun, sejak tahun 2015. Ada dua indikator yang berhubungan dengan pembangunan desa di Indonesia, yaitu Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD). IKG digunakan sebagai dasar alokasi formula Dana Desa, sedangkan IPD digunakan untuk mengukur capaian pembangunan layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat desa. Kedua alat ukur pembangunan desa ini sama-sama memiliki kekurangan serupa, yaitu keduanya memiliki beberapa indikator yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh paralegal dan kebijakan yang ada di desa. Metodologi yang digunakan pada kajian ini menggunakan Uji Perubahan Indikator Komparatif Berpasangan, yaitu dengan uji statistik McNemar-Bowker Test dan Wilcoxon Signed Rank Test data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi terdistribusi tidak normal. Penelitian pola perubahan kategori capaian indikator Pembangunan Desa 2014 dan 2018, yakni Ketersediaan dan Akses Ke TK/RA/BA, Ketersediaan Pertokoan, Minimarket atau Toko Kelontong, Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), Otonomi Desa dan Aset/kekayaan Desa menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 2014 dan 2018. Hal tersebut mengindikasikan adanya pembuatan indikator yang tidak diukur dan pengukuran indikator yang tidak dibangun melalui anggaran Dana Desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Indikator Pembangunan Desa,

DAFTAR SINGKATAN

Bappenas	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BTS	: <i>Base Transreceiver Station</i>
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
IDM	: Indeks Desa Membangun
IKG	: Indeks Kesulitan Geografis
IPD	: Indeks Pembangunan Desa
KLB	: Kejadian Luar Biasa
LPJ	: Elpiji (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)
MCK	: Mandi Cuci Kakus
PADes	: Pendapatan Asli Desa
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Podes	: Potensi Desa
POLINDES	: Pondok Bersalin Desa
Poskesdes	: Pos Kesehatan Desa
Posyandu	: Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RDP	: Rural Development Project
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RS	: Rumah Sakit
RSB	: Rumah Sakit Bersalin
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPM	: Standar Pelayanan Umum
TK/RA/BA	: Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal
UPT/SPT	: Unit Pemukiman Transmigrasi/Satuan Pemukiman Transmigrasi

Latar Belakang

Percepatan pembangunan desa telah berjalan hingga tahun kelima. Dana desa yang bergulir dari tahun 2015 hingga 2019 pun sudah melebihi Rp252 triliun. Salah satu pencapaiannya dapat dilihat pada tahun 2018 desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa, dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 desa. Percepatan ini dimulai sejak tahun 2014, setelah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ditetapkan.

Paradigma pembangunan desa mengikuti pola desentralisasi. Kondisi ini memberikan paradigma baru bagi perangkat desa dalam memahami sistem finansial, pemberdayaan warga, sehingga penguatan institusi di tingkat desa diperlukan untuk mendorong pemerintah desa bekerja dengan baik (Antlöv, et al. 2016). Sehingga, peningkatan anggaran dana desa dapat menjadi harapan baru karena menjadi stimulus yang baik bagi pertumbuhan perekonomian desa.

Dana desa sebagai stimulus mendorong perekonomian desa menjadi lebih cepat maju. Percepatan pembangunan yang dilakukan melalui perbaikan infrastruktur sebagai penyangga akses perekonomian serta pemberdayaan dalam bentuk padat karya, dijadikan sebagai stimulus fiskal yang mendorong peningkatan perekonomian di tingkat desa.

Kesuksesan pembangunan di tingkat desa tidak lepas dari peran pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun telah ada program Dana Desa sebagai stimulus, dalam perjalanannya kepala desa tetap merupakan tokoh utama dan pemimpin penggerak perekonomian di desa. Selain itu, seluruh perangkat desa yang aktif akan semakin meningkatkan peluang suksesnya pembangunan desa.

Pembangunan desa di negara berkembang dilaksanakan dengan beragam cara, salah satunya adalah dengan menyediakan modal bergulir di tingkat lokal. Contohnya adalah Thailand, setelah meluncurkan program Dana Desa dan Perkotaan pada tahun 2001 masyarakat Thailand mampu menyediakan modal kerja bagi asosiasi kredit bergilir yang dikelola secara lokal. Namun ternyata, pinjaman dari Bank untuk Pertanian dan Koperasi Pertanian memiliki dampak yang lebih kuat. Modal kerja mengalir secara tidak proporsional ke rumah tangga berpenghasilan rendah. (Boonperm, et al. 2013). Sementara itu, di Nepal kredit mikro adalah alat yang efektif untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin, terutama perempuan (Adhikari dan Shrestha, 2013). Selain kredit mikro, ada negara lain yang merancang desa dengan rencana induk.

Lain lagi halnya yang terjadi di Iran. Rural Development Project (RDP) Iran berhasil dalam meningkatkan keinginan untuk tinggal di desa, mendorong kenaikan harga tanah, meningkatkan partisipasi dalam proyek konstruksi pedesaan, meningkatkan akses terhadap *input* pertanian dan pasar untuk produk pertanian, serta memperkuat fondasi langkah-langkah yang menarik partisipasi warga desa (Ebrahimi, M.S., Amini, A.M., Hanif, M. 2014). Sementara di Tajikistan, kepemimpinan desa berperan penting dalam kesuksesan pengelolaan anggaran yang disediakan. Sehingga, pemimpin desa dan perangkatnya mampu melaksanakan proyek pembangunan dengan sejumlah dana yang dianggarkan dari perwakilan yayasan Aga Khan (Jones, D., Nekbaktshoev, N., Spechler, D., 2016).

Di Indonesia sendiri, percepatan pembangunan desa berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan adalah pembangunan embung, jalan desa, jembatan, pasar desa, penahan tanah, tambatan perahu, air bersih, drainase, saluran irigasi, hingga tempat mandi cuci kakus (MCK) dan sumur. Pembangunan juga mencakup aktivitas ekonomi sosial seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pembangunan tempat olah raga desa, pembangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Posyandu (Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu), serta infrastruktur lainnya. Hal tersebut konsisten dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Laporan Kinerja PPMD 2018).

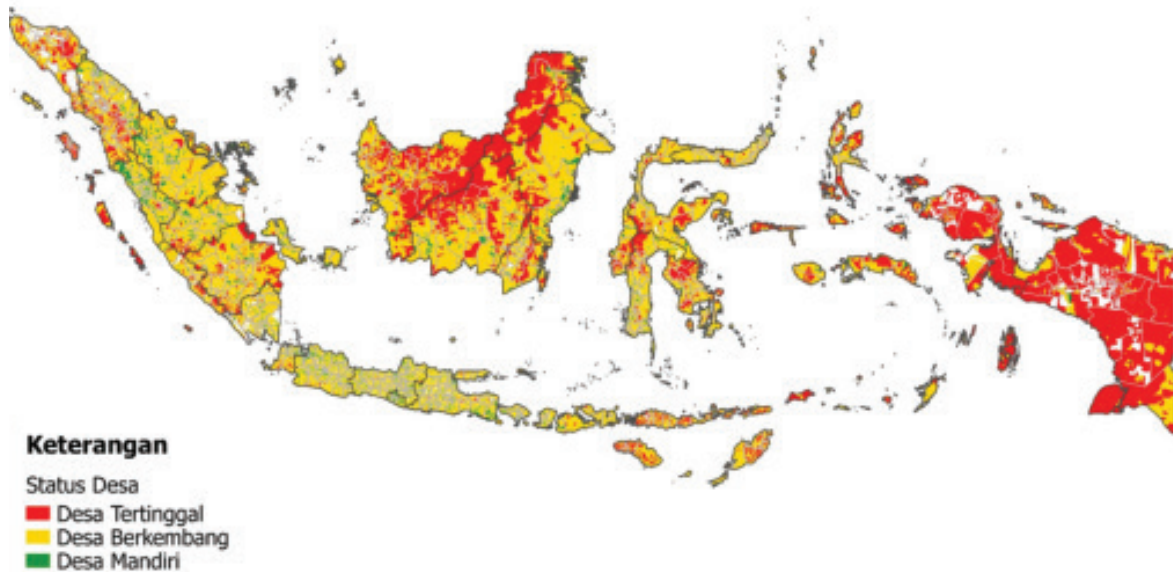
Di luar pembangunan infrastruktur, dampak pembangunan desa terhadap kemiskinan di desa masih menjadi perdebatan. Bahkan, studi kasus di Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Dana Desa dan alokasinya tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Lalira, Nakoko, Rorong, 2018). Selain itu, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap meningkatnya kemiskinan karena sebagian besar warga miskin bekerja sebagai petani. Kejadian krisis yang pernah terjadi di Indonesia menjadi gambaran betapa rentannya penduduk miskin di desa (Bremen, 2001).

Kondisi perkembangan pembangunan desa telah digambarkan dalam beragam indeks. Setidaknya ada tiga indeks yang dihitung dan memiliki tujuan yang berbeda. Pertama, Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang berfungsi sebagai penentu pembagian dana desa. Semakin bagus pembangunan desa, maka nilai kesulitannya semakin berkurang. Indeks yang kedua yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang bertujuan untuk melihat capaian pembangunan layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat desa. Semakin baik pembangunan desa, semakin mandiri desa tersebut untuk meningkatkan daya saing desa. Ketiga, Indeks Desa Membangun (IDM) yang berfungsi menilai keberlangsungan pembangunan desa. Pembangunan desa yang baik, menggambarkan kualitas pembangunan terhadap dampak lingkungan dan sosial yang baik juga.

Ketiga alat ukur pembangunan desa ini memiliki kekurangan serupa, yaitu ada indikator-indikator yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh paralegal dan pemangku kebijakan di desa. Salah satu contoh adalah fasilitas sekolah sebagai indikator layanan pendidikan dasar, dimana pemerintah desa tidak mampu membangun sekolah. Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa dan PDT nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, pemerintah desa tidak dapat mendirikan fasilitas tersebut karena peraturan tersebut sudah sangat detail mengatur infrastruktur apa saja yang dapat dibangun pemerintah desa dengan Dana Desa. Selain itu, masih banyak indikator lain yang tidak bisa ditindaklanjuti.

Di antara ketiga alat ukur pembangunan desa ini, IKG dan IPD saling terkait satu sama lain dimana seluruh indikator yang tersusun dalam IKG juga merupakan bagian dari indikator IPD. Oleh karenanya ketika indikator IPD dievaluasi, indikator IKG pun otomatis terevaluasi. Dari 42 indikator pembangunan desa yang ada dalam IPD, menurut catatan penulis hanya ada 23 indikator yang dapat ditindaklanjuti oleh paralegal di desa sesuai dengan panduan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Gambar 1. Sebaran Desa Menurut Status Desa (Tertinggal, Berkembang, dan Mandiri)



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Desa (IPD), BPS 2018

Salah satu dampak dari ketentuan Peraturan Menteri ini adalah apabila suatu desa telah memiliki 23 indikator tersebut akan menjadi sulit bagi desa untuk mencapai kemandirian. Artinya, alat ukur pembangunan desa yang digunakan saat ini akan membuat desa-desa tertinggal dan terjebak dalam status desa berkembang. Namun, kejadian ini dapat diantisipasi dengan kebijakan dari pemerintah di atas pemerintah desa, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Selain persoalan ini, ada penyebab lain yang menyebabkan ketimpangan pembangunan desa, yaitu Dana Desa yang sebagian besar terserap di Sumatera, Jawa, Bali.

Tabel 1. Jumlah Desa Menurut Wilayah Kepulauan Tahun 2018

No	Wilayah Kepulauan	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
1	Sumatra	23.241	30.8	30.8
2	Java – Bali	23.108	30.6	61.4
3	Nusa Tenggara	4.043	5.4	66.8
4	Kalimantan	6.624	8.8	75.6
5	Sulawesi	8.804	11.7	87.3
6	Maluku	2.268	3	90.3
7	Papua	7.348	9.7	100
	Total	75.436	100	100

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2018

Tidak meratanya penyerapan anggaran ini dianggap sebagai salah satu penyebab semakin sulitnya mengejar ketimpangan. Jumlah desa tahun 2018 di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mencapai 50.392 desa (66,8%), sedangkan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, hanya ada sebanyak 25.044 desa (33,2%). Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) memberi gambaran ketimpangan ini.

Selain penyerapan anggaran Dana Desa, persoalan indikator yang mendasari penghitungan alat ukur pembangunan desa juga perlu disesuaikan. Diperlukan adanya kesepahaman bersama mengenai pendekatan Standar Pelayanan Minimum sesuai kewajiban dan beban tugas, khususnya terkait fasilitas pelayanan dasar yang tidak dapat dipenuhi oleh pengambil kebijakan di tingkat desa. Terlepas dari hal tersebut, alat ukur perkembangan pembangunan desa yang dirancang dengan pendekatan Standar Pelayanan Minimum ini masih menyisakan persoalan, yaitu “Mengukur Apa Yang Tidak Dibangun Dan Membangun Apa Yang Tidak Diukur”.

Sumber Data

Pada kajian ini, sumber data yang digunakan sesuai dengan sumber data untuk menghitung Indeks Pembangunan Desa (IPD), yaitu data Potensi Desa (Podes). Data Podes merupakan data kewilayahan pada unit administrasi terendah di Indonesia, yaitu desa/kelurahan. Data ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari seluruh wilayah desa, kelurahan, UPT/SPT secara menyeluruh. Adapun waktu BPS mengumpulkan data adalah setiap dua tahun menjelang sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi.

Data Podes menggambarkan kondisi infrastruktur yang tersedia di desa dalam kurun waktu periode pendataan. Data yang tercatat mencakup: tipologi desa, kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, bencana alam dan mitigasi, pendidikan dan kesehatan, sosial dan budaya, olah raga dan hiburan, angkutan komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, aset, pembangunan dan pemberdayaan, serta kondisi aparat desa/kelurahan.

Evaluasi Pembangunan Desa 2018

Kajian ini mengevaluasi Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang merupakan indeks komposit untuk menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Dalam evaluasi kali ini kami memilih IPD agar kami dapat memperoleh dua hasil sekaligus. Hasil yang pertama adalah untuk mengevaluasi penentu alokasi Dana Desa, yaitu Indeks Kesulitan Geografis (IKG), dan yang kedua adalah untuk mengevaluasi IPD itu sendiri.

IPD dan IKG memiliki sumber data yang sama, yakni dari hasil pendataan Podes. Dari pendataan tersebut ada 5 dimensi dan 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat Desa. Hasil IPD 2018 menunjukkan ada sebanyak 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang, dan 14.461 desa tertinggal. Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai IPD sebesar 59,36.

IPD telah dihitung sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2014 dan 2018. Metode dan penimbang indikator pada kedua periode tersebut tidak mengalami perubahan. Kondisi data tahun 2014 menjadi kunci dalam

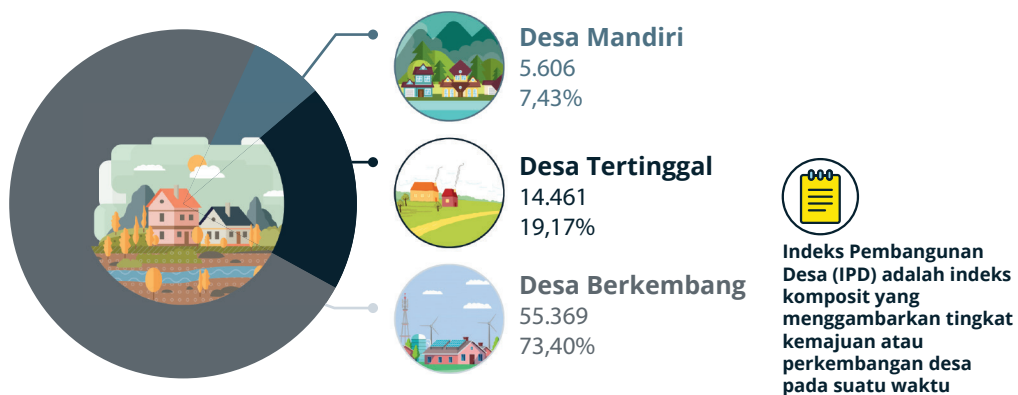
menentukan indikator dasarnya, seperti jarak dari desa ke kecamatan maupun kabupaten.

IPD telah digunakan untuk merancang desa target RPJMN tahun 2015-2019. Adapun yang menjadi target capaian adalah berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa dan meningkatnya desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Atas dasar amanat tersebut maka klasifikasi desa berdasarkan IPD adalah Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal.

Hasil dari penyusunan IPD ini adalah seluruh desa di Indonesia dapat terpetakan dengan baik berdasarkan tingkat perkembangan desa sesuai dengan klasifikasi IPD tersebut.

Hingga saat ini, pengukuran pembangunan desa dengan IPD telah dilaksanakan dua kali, yaitu pada tahap perencanaan dan evaluasi. Pertama pada tahap perencanaan, pengukuran dilaksanakan pada tahun 2015 dengan mengukur desa-desa yang terdaftar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39/2015. Data desa yang digunakan adalah data Potensi Desa (Podes) tahun 2014. Hasil IPD tahun 2015 ini tertuang dalam buku yang berjudul Indeks Pembangunan Desa 2014 "Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa" diterbitkan pada tahun 2015, dan merupakan hasil kolaborasi antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Grafik 1. Jumlah Desa menurut Status IPD

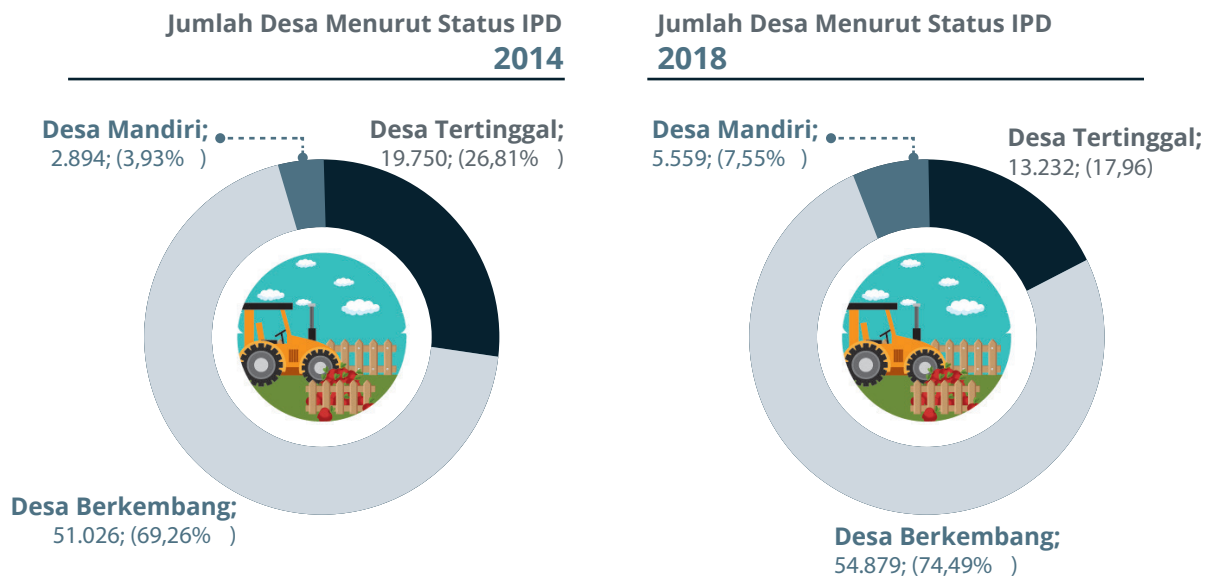


Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Desa (IPD), BPS 2018

Kedua, pada tahap evaluasi IPD dihitung kembali pada tahun 2018. Penghitungan IPD tahun 2018 menggunakan daftar dan data desa hasil Pendataan Potensi Desa 2018. Hasil dari penghitungan tersebut disajikan dalam buku yang berjudul Indeks Pembangunan Desa 2018 yang disusun oleh BPS. Buku ini memberikan ulasan hasil pembangunan desa melalui IPD setiap desa, setiap provinsi, dan setiap wilayah pulau besar. IPD merangkum hasil pembangunan desa yang beragam sesuai dengan kebutuhan lokalitas masing-masing desa.

Hasil IPD 2018 menunjukkan keberhasilan pembangunan desa tahun 2018. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan berkurangnya desa tertinggal sebanyak 6.518 desa, dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 desa. Perkembangan pembangunan desa ini dilihat dari lima dimensi standar pelayanan minimum dengan capaian yang berbeda-beda. Capaian tertinggi terdapat pada dimensi penyelenggaraan pemerintahan, yang meningkat sebesar 9,81 poin. Sementara capaian peningkatan terendah ada pada dimensi pelayanan dasar sebesar 0,92 poin.

Grafik 2. Perbandingan Hasil IPD tahun 2014 dan 2018



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Desa (IPD), BPS 2018

Catatan: Perbandingan status IPD ini dilakukan untuk desa-desa yang sama dengan tahun 2014, yaitu sebesar 73.670

Alat Ukur Pembangunan Desa

Alat ukur perkembangan pembangunan desa dirancang dengan pendekatan Standar Pelayanan Minimum yang menjadi kewajiban pemerintah di tingkat desa. Namun, pendekatan ini masih menyisakan persoalan, yaitu mengukur apa yang tidak dibangun dan membangun apa yang tidak diukur. Pemerintah administrasi desa mengerjakan pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa tentang Penggunaan Dana Desa yang setiap tahun dikeluarkan sejak 2015. Peraturan terakhir tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019.

Gambar 2. Hubungan Antara IPD dan IKG



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Desa (IPD), BPS 2018

Baik IPD dan IKG merupakan alat ukur pencapaian layanan dasar tingkat desa, tetapi masing-masing memiliki arah yang berbeda. Indikator IKG terdiri dari seluruh indikator IPD dengan tambahan 2 dimensi. IPD dihitung berdasarkan 5 dimensi, 12 variabel, dan 42 indikator, sedangkan IKG dihitung berdasarkan 3 dimensi dan 28 indikator.

Layanan dasar yang diukur, setidaknya telah memenuhi aturan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Dasar hukum ini menjadi acuan BPS untuk mengukur pembangunan desa melalui IPD.

Metode Analisis

Pada kajian ini, pengujian dilakukan dengan uji perubahan indikator komparatif berpasangan dengan dua statistik uji. Pertama adalah McNemar-Bowker Test dan yang kedua adalah Wilcoxon. Statistik uji McNemar-Bowker Test digunakan untuk menguji perubahan kategori yang dihasilkan dari tabel simetri berpasangan, sementara Wilcoxon digunakan untuk mengukur signifikansi perbedaan dari kategori yang dihasilkan. Kedua uji ini dipakai untuk melihat pola perubahan indikator yang digunakan untuk mengukur IPD dan IKG tahun 2014 dan 2018.

McNemar-Bowker Test

McNemar-Bowker Test digunakan untuk menguji tabel simetri berpasangan dengan kategori lebih dari 2. Data berpasangan yang dihasilkan diringkas dalam tabel kontingensi K x K. Uji ini dikalkulasi dengan rumus T_{MB} berikut:

$$T_{MB} = \sum_{i < j} \frac{(n_{ij} - n_{ji})^2}{n_{ij} + n_{ji}}$$

Hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat perubahan kategori indikator pembangunan desa dari 2014 ke 2018

H_a : Terdapat perubahan kategori indikator pembangunan desa dari 2014 ke 2018

Syarat: apabila chi kuadrat lebih kecil dari chi tabel, H_0 diterima dan selain itu H_a ditolak, atau jika Asymp. Sig. (2-sided) lebih besar dari taraf signifikansi yang diperkenankan, H_0 diterima dan selain itu H_a ditolak.

Wilcoxon

Wilcoxon Signed Rank Test adalah uji nonparametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara 2 kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon Signed Rank Test merupakan uji alternatif dari uji *pairing t test* atau *t paired* apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini dikenal juga dengan istilah Wilcoxon Match Pair Test. Uji ini dihitung dengan rumus W berikut:

$$W = \sum_{i=1}^{N_r} [sgn(x_{2,i} - x_{1,i}) \cdot R_i]$$

Hipotesis:

H_0 : Tidak ada perbedaan kategori indikator pembangunan desa dari 2014 ke 2018

H_a : Ada perbedaan kategori indikator pembangunan desa dari 2014 ke 2018

Pada uji ini memiliki asumsi atau syarat yang harus dipenuhi, seperti variabel dependen berskala data ordinal atau interval/rasio tetapi berdistribusi tidak normal. Variabel independen terdiri dari 2 kategori yang berpasangan. Bentuk dan sebaran data antara kedua kelompok yang berpasangan adalah simetris.

Kualitatif

Pada kajian ini, dilakukan telaah terhadap kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa. Kewenangan perangkat desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019. Telaah ini dilakukan untuk melihat sejauh mana indikator pembangunan desa dapat ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan yang sekaligus juga menjadi wewenang perangkat desa. Dari fakta adanya fasilitas pelayanan dasar yang tidak mampu dipenuhi oleh pengambil kebijakan di desa menunjukkan bahwa kewenangan perangkat desa sangat terbatas.

Hasil Kajian

Kajian evaluasi alat ukur pembangunan desa ini mengevaluasi setiap indikator pembentuk nilai indeks. Oleh karenanya, dari uji perubahan indikator komparatif berpasangan menghasilkan indikator yang berubah signifikan dan tidak berubah signifikan. Selain itu, kajian ini juga menguji dari segi kualitatif dengan melihat sejauh mana kewenangan perangkat desa untuk menindaklanjuti kebijakan di tingkat desa. Hasilnya berupa indikator apa saja yang dapat ditindaklanjuti melalui kewenangan perangkat desa dan yang bukan melalui kewenangan perangkat desa. Hal ini mengakibatkan indeks yang dihasilkan tidak menggambarkan perkembangan pembangunan desa secara utuh. Masing-masing indikator diurai per dimensi, mulai dari fasilitas ketersediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan hingga SDM perangkat desa. Hasil uji McNemar-Bowker Test dan Wilcoxon secara lengkap dapat dilihat pada lampiran

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar

Ketersediaan dan akses ke pelayanan dasar berupa infrastruktur pendidikan menjadi kunci dekatnya layanan pemerintah kepada warga. Mudah akses ke layanan ini diharapkan mampu menurunkan biaya transportasi menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, diharapkan dapat pula digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam melayani warganya.

Fasilitas Pendidikan

Keterjangkauan fasilitas pendidikan dasar menjadi kunci perbaikan sumber daya manusia. Pada indikator ini, layanan pendidikan dasar yang diukur mulai dari setingkat TK hingga SMA. Keterjangkauannya dihitung dari kantor kepala desa menuju fasilitas terdekat.

Tabel 2. Hasil Uji Indikator Fasilitas Pendidikan

Variabel	Keterangan	McNemar-Bowker	Wilcoxon
Fasilitas Pendidikan	Ketersediaan dan Akses ke TK/RA/BA	++	+
	Ketersediaan dan Akses ke SD Sederajat	++	++
	Ketersediaan dan Akses ke SMP Sederajat	++	++
	Ketersediaan dan Akses ke SMA Sederajat	++	++

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018

Keterangan: * signifikan dengan alfa 0,01, ** signifikan dengan alfa 0,05

Hasil uji Wilcoxon membuktikan bahwa indikator ini tidak menggambarkan perubahan di dalam taraf signifikansi alpha 0,05. Hasilnya, ketersediaan fasilitas dan akses ke TK/RA/BA tidak mengalami perubahan kategori secara signifikan.

Keterbatasan:

- Fasilitas pendidikan dasar, tidak dapat dibangun oleh pemerintah desa. Sekolah Dasar (SD) dan sekolah menengah (SMP/SMA) menjadi kewenangan pemerintah di atas pemerintah desa.
- Indikator infrastruktur belum melibatkan kemudahan akses
- Pembagi indikator infrastruktur pendidikan adalah jumlah penduduk, bukan jumlah penduduk usia sekolah di tingkatannya
- Jarak terdekat ke infrastruktur dilihat dari sebaran data hasil Podes tahun 2014, bukan dari aturan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum pemerintah

Fasilitas Kesehatan

Keterjangkauan fasilitas kesehatan menjadi kunci pelayanan kesehatan pemerintah terhadap warga. Layanan kesehatan yang diukur mulai dari akses ke fasilitas kesehatan Rumah Sakit (RS) hingga pemenuhan obat-obatan yaitu apotek. Keterjangkauannya dilihat dari jarak tempuh dari kantor kepala desa menuju fasilitas terdekat. Kemudahan aksesnya merupakan persepsi dari narasumber. Namun, jika di desa tersebut sudah tersedia fasilitas kesehatan, diasumsikan keterjangkauan dan kemudahan menuju fasilitas sudah terpenuhi.

Tidak semua fasilitas kesehatan dasar dapat dibangun oleh pemerintah desa. Seperti rumah sakit (RS), rumah sakit bersalin (RSB), dan Puskesmas merupakan kewenangan pemerintah di atas pemerintah desa. Selain fasilitas tersebut, seperti balai pengobatan, poliklinik, tempat praktik bidan, dan apotek dapat dibangun oleh masyarakat. Pada variabel ini hanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang dapat dibangun melalui wewenang perangkat desa. Berikut ini adalah daftar keterbatasan terkait variabel fasilitas kesehatan.

Keterbatasan:

- Variabel fasilitas kesehatan dasar, hanya Poskesdes dan Polindes yang infrastrukturnya dapat dibangun oleh pemerintah desa. Sementara infrastruktur kesehatan lainnya bukan kewenangan pemerintah desa.
- Pembagi indikator infrastruktur pendidikan serta kesehatan adalah jumlah penduduk keseluruhan, bukan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan. Misalnya untuk infrastruktur pendidikan, jumlah fasilitas pendidikan SMP dibagi dengan jumlah penduduk, bukan penduduk usia SMP. Sementara itu, pembagi fasilitas kesehatan seperti tempat praktik bidan juga dibagi dengan jumlah penduduk, bukan jumlah perempuan dan anak-anak.
- Jarak terdekat ke infrastruktur dilihat dari sebaran data hasil Podes tahun 2014, bukan dari aturan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum.

- Keterlibatan infrastruktur lain dalam penghitungan indikator yang lebih rendah. Misalnya, dalam menyusun indikator puskesmas melibatkan rumah sakit, menyusun indikator tempat praktik bidan melibatkan indikator rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan puskesmas. Sehingga indikator fasilitas kesehatan bukan cerminan dari fasilitas kesehatan yang bersangkutan saja, namun juga mencerminkan keberadaan fasilitas yang lebih tinggi di atasnya.

Tabel 3. Hasil Uji Indikator Fasilitas Kesehatan

Variabel	Keterangan	McNemar-Bowker	Wilcoxon
Fasilitas Kesehatan	Ketersediaan dan Akses ke Rumah Sakit	+*	+*
	Ketersediaan dan Akses ke Rumah Sakit Bersalin	+*	+*
	Ketersediaan dan Akses ke Puskesmas	+*	+*
	Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poliklinik/Balai Pengobatan	+*	+*
	Akses ke Tempat Praktik Dokter	+*	+*
	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Tempat Praktik Bidan	+*	+*
	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poskesdes atau Polindes	+*	+*
	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Apotek	+*	+*

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018

Keterangan: * signifikan dengan alpa 0,01, ** signifikan dengan alpa 0,05

2. Kondisi Infrastruktur

Kondisi infrastruktur merefleksikan mudah atau tidaknya pemenuhan kebutuhan hidup warga. Infrastruktur yang dimaksud dapat berupa fasilitas perekonomian, akses ke sumber energi untuk rumah tangga, air bersih dan sanitasi, serta komunikasi dan informasi.

Infrastruktur Ekonomi

Indikator infrastruktur ekonomi memberi gambaran akses warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimensi ini menunjukkan tingkat kemudahan akses warga desa terhadap sumber daya dan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan. Harapannya, warga desa dapat dengan mudah memenuhi segala kebutuhan hidupnya sama seperti dengan penduduk di kota.

Fasilitas perekonomian di desa dapat dibangun melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa yang berpotensi menjadi desa wisata telah banyak mengembangkan penginapan dan *homestay* untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan. Selain itu, desa juga dapat membangun pasar desa, termasuk toko bahan keperluan sehari-hari.

Tabel 4. Hasil Uji Indikator Fasilitas Perekonomian

Variabel	Keterangan	McNemar-Bowker	Wilcoxon
Fasilitas Perekonomian	Ketersediaan Pertokoan, Minimarket atau Toko Kelontong	++	+
	Ketersediaan dan Akses ke Pasar	++	++
	Ketersediaan dan Akses ke Restoran, Rumah Makan atau Warung/Kedai Makan	++	++
	Akses ke Akomodasi Hotel atau Penginapan	++	++
	Ketersediaan dan Akses ke Bank	++	++

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018

Keterangan: * signifikan dengan alfa 0,01, ** signifikan dengan alfa 0,05

Keterbatasan:

- Variabel fasilitas perekonomian dapat dibangun oleh pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuannya, untuk mendukung pusat perekonomian desa seperti pembangunan desa wisata dan pusat ekonomi lainnya. Sementara infrastruktur layanan keuangan (Bank) bukan kewenangan pemerintah desa.
- Ketersediaan dan akses ke bank dilihat dari kantor kas yang ada di desa, tidak termasuk agen bank.
- Indikator pasar dilihat dari rasio kecukupan pasar dengan jumlah penduduk.

Infrastruktur Energi

Indikator infrastruktur energi memberi gambaran akses warga dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari seperti listrik, penerangan jalan, serta bahan bakar. Dimensi ini dapat menunjukkan apakah kebutuhan energi warga sehari-harinya terpenuhi atau tidak, mulai dari penerangan hingga bahan bakar untuk memasak.

Tabel 5. Hasil Uji Indikator Fasilitas Energi

Variabel	Keterangan	McNemar-Bowker	Wilcoxon
Infrastruktur Energi	Akses ke Energi Listrik	++	++
	Akses ke Penerangan Jalan	++	++
	Akses ke Bahan Bakar	++	++

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018

Keterangan: * signifikan dengan alfa 0,01, ** signifikan dengan alfa 0,05

Keterbatasan:

- Variabel infrastruktur energi lebih banyak difasilitasi oleh pemerintah di luar desa, seperti penyaluran listrik ke desa oleh PLN. Meski demikian, desa yang belum teraliri listrik, dapat membangun sumber listrik mikro hidro yang dapat dibangun melalui kewenangan pemerintah desa. Begitu juga dengan akses dan penyediaan bahan bakar, yaitu minyak tanah dan gas, lebih banyak difasilitasi oleh pemerintah di luar desa.
- Indikator pada variabel infrastruktur energi menunjukkan *output* dari infrastruktur yang berkaitan langsung dengan energi.
- Indikator ini dijadikan pendekatan bahwa, semakin terpenuhinya kebutuhan energi warga, semakin baik infrastruktur energi yang tersedia di desa itu.

Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi

Pemenuhan air bersih dan sanitasi merupakan infrastruktur yang penting di desa. Indikator air bersih dan sanitasi menjadi potret kemampuan warga desa dalam mengakses sumber kehidupan ini. Mulai dari sumber air untuk minum, sumber air untuk mandi/cuci, hingga akses terhadap sanitasi untuk tempat buang air besar sebagian besar keluarga.

Variabel air bersih dan sanitasi digunakan sebagai ukuran seberapa mudahnya warga mendapatkan air bersih sekaligus mengukur tingkat kebersihan pembuangan limbah rumah tangga, seperti limbah kakus.

Tabel 6. Hasil Uji Indikator Air Bersih dan Sanitasi

Variabel	Keterangan	McNemar-Bowker	Wilcoxon
Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi	Sumber Air Minum	++	++
	Sumber Air Mandi/Cuci	++	++
	Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga	++	++

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018

Keterangan: * signifikan dengan alfa 0,01, ** signifikan dengan alfa 0,05

Keterbatasan:

- Variabel infrastruktur air bersih dan sanitasi dapat difasilitasi melalui kewenangan pemerintah desa
- Variabel sanitasi pada bagian ini hanya digambarkan oleh tempat pembuangan air besar sebagian besar keluarga. Sementara, ukuran sanitasi untuk masyarakat desa dapat digambarkan dengan lebih baik apabila ditambahkan indikator lain penunjang sanitasi masyarakat, seperti tempat pembuangan sampah dan limbah cair disertakan untuk mengukur variabel sanitasi.
- Variabel sanitasi juga erat kaitannya dengan pencemaran, namun pada indikator ini tidak melibatkan informasi pencemaran serta pemukiman kumuh.
- Indikator tempat buang air besar memiliki 4 kategori (0, 2, 3, 5), berbeda dengan indikator lain yang memiliki 6 kategori (0-5).

Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

Penunjang kebutuhan komunikasi tercermin dalam variabel komunikasi dan informasi. Indikator variabel ini berupa ketersediaan dan kualitas fasilitas komunikasi seluler serta akses terhadap pos atau barang. Tujuannya adalah memudahkan warga masyarakat untuk berkomunikasi dan pengiriman informasi serta barang dari dan ke luar desa. Sehingga, masyarakat tidak terisolasi secara geografis.

Tabel 7. Hasil Uji Indikator Komunikasi dan Informasi

Variabel	Keterangan	McNemar-Bowker	Wilcoxon
Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler	+	+
	Akses ke Pengiriman Pos atau Barang	+	+

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018

Keterangan: * signifikan dengan alfa 0,01, ** signifikan dengan alfa 0,05

Keterbatasan:

- Variabel infrastruktur komunikasi dan informasi lebih banyak difasilitasi oleh pemerintah di luar desa, seperti penyediaan jaringan seluler melalui pengadaan BTS (*Base Transceiver Station*). Selain itu, infrastruktur jasa ekspedisi melalui pos atau barang, juga tidak bisa difasilitasi melalui kewenangan pemerintah desa.
- Indikator ketersediaan dan kualitas fasilitas komunikasi seluler dilihat dari keberadaan BTS (*Base Transceiver Station*) atau menara pemancar sinyal, serta kuat/tidaknya sinyal telepon seluler.
- Indikator pengiriman pos atau barang ini disusun dari kombinasi internet yang ada di kantor desa, keberadaan warnet di desa, keberadaan pos dan pos keliling, serta perusahaan jasa ekspedisi.
- Pada variabel ini, hanya internet di kantor desa yang dapat difasilitasi oleh pemerintah desa.

3. Aksesibilitas/Transportasi

Aksesibilitas dan pelayanan transportasi menjadi kunci kemudahan akses warga desa menuju sumber daya dan fasilitas pelayanan dasar yang dibutuhkan. Dengan demikian, warga desa dapat memenuhi segala kebutuhan hidup dengan mudah seperti warga di kota.

Tabel 8. Hasil Uji Indikator Aksesibilitas/Transportasi

Variabel	Keterangan	McNemar-Bowker	Wilcoxon
Infrastruktur Aksesibilitas/Transportasi	Lalu Lintas dan Kualitas Jalan Untuk Transportasi Antardesa	+*	+*
	Aksesibilitas Jalan	+*	+*
	Ketersediaan Angkutan Umum	+*	+*
	Operasional Angkutan Umum	+*	+*
	Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi ke Kantor Camat	+*	+*
	Biaya Per Kilometer Transportasi ke Kantor Camat	+*	+*
	Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi ke Kantor Bupati/Walikota	+*	+*
	Biaya Per Kilometer Transportasi ke Kantor Bupati/Walikota	+*	+*

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018

Keterangan: * signifikan dengan alpa 0,01, ** signifikan dengan alpa 0,05

Keterbatasan:

- Variabel infrastruktur aksesibilitas/transportasi dapat dibangun melalui kewenangan pemerintah desa.
- Syarat pembentukan desa baru adalah memiliki akses ke luar desa (UU No. 6/2014 tentang Desa). Dampak dari syarat ini, semua desa telah memiliki akses ke luar desa, sehingga, kategori indikator yang terbentuk tidak dimulai dari 0-5, namun 1-5.
- Kategori 1-5 terdapat pada dua indikator, yaitu lalu lintas dan kualitas jalan untuk transportasi antardesa dan aksesibilitas jalan.
- Indikator aksesibilitas jalan dari dan ke desa yang melalui air memiliki kategori indikator 1 (paling rendah). Meskipun aksesnya relatif mudah, desa yang hanya dapat dijangkau melalui air (sungai, laut) tidak dapat mengubah kategori dalam indikator ini.
- Sementara itu, indikator operasional angkutan umum yang melewati air, berkode 0 (paling rendah).

4. Pelayanan Umum

Dimensi pelayanan umum ini mewakili aspek kesehatan lingkungan masyarakat, mulai dari upaya menjaga kesehatan masyarakat hingga penanganan kesehatan. Oleh karena terbatasnya data Podes, variable yang digunakan untuk mengkaji dimensi ini hanya sebatas penanganan kejadian luar biasa (KLB) dan penanganan gizi buruk, serta ketersediaan fasilitas olah raga seperti lapangan olah raga dan kelompok kegiatan olah raga.

Tabel 9. Hasil Uji Indikator Pelayanan Umum

Variabel	Keterangan	McNemar-Bowker	Wilcoxon
Infrastruktur Aksesibilitas/ Transportasi	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)	+*	+
	Penanganan Gizi Buruk	+*	+*
	Ketersediaan Fasilitas Olahraga	+*	+*
	Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga	+*	+*

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018

Keterangan: * signifikan dengan alfa 0,01, ** signifikan dengan alfa 0,05

Keterbatasan:

- Variabel pelayanan umum, sebagian pelayanan dapat difasilitasi melalui kewenangan pemerintah desa, yaitu melalui Posyandu, Poskesdes, atau Polindes. Selain itu, penyediaan fasilitas dan kelompok olah raga juga dapat difasilitasi melalui kewenangan pemerintah desa. Namun, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) hanya bisa dilakukan melalui kewenangan di luar pemerintah desa, yaitu Puskesmas.
- Perbedaan indikator penanganan KLB tidak signifikan.
- Indikator KLB memiliki kategori sebanyak 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 5. Tidak ada kode 4 dalam pembentukan indikator ini.
- Variabel pelayanan umum merupakan pendekatan *output* untuk melihat penanganan penyakit warga dan upaya menjaga kesehatan di desa.
- Indikator penanganan gizi buruk memiliki 5 kategori, yaitu 0, 1, 2, 3, 5. Tidak ada kode 4 dalam pembentukan indikator ini.
- Ketersediaan fasilitas dan kelompok olahraga dapat difasilitasi oleh pemerintah desa.
- Penanganan kejadian luar biasa (KLB) dan gizi buruk dilaksanakan oleh puskesmas dan dinas kesehatan setempat.

5. Penyelenggaraan Pemerintahan

Dimensi penyelenggaraan pemerintahan dikaji untuk melihat secara umum kemampuan desa dalam mengelola pemerintahannya. Terutama untuk melihat kemandirian pemerintah desa dalam menghasilkan pendapatan asli desa (PADes), serta untuk menilai kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa. Dimensi ini sekaligus menjadi potret kinerja pemerintah desa dalam mengelola desanya.

Kemandirian

Penyelenggaraan pemerintahan menggambarkan indikasi kinerja pemerintahan desa dalam bentuk pelayanan administratif. Variabel ini diperlukan sebagai sebuah indikator pembangunan desa, karena sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa tersebut. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan aset/kekayaan desa; serta kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.

Tabel 10. Hasil Uji Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan

Variabel	Keterangan	McNemar-Bowker	Wilcoxon
Penyelenggaraan Pemerintahan	Kelengkapan Pemerintahan Desa	+	
	Otonomi Desa	+	
	Aset/kekayaan Desa	+	
	Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga	+	

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018

Keterangan: * signifikan dengan alfa 0,01, ** signifikan dengan alfa 0,05

Keterbatasan:

- Variabel penyelenggaraan pemerintahan merupakan kewenangan pemerintah desa.
- Informasi penerimaan asli desa (PAD) digunakan lebih dari sekali, yaitu pada indikator otonomi desa dan indikator aset/kekayaan desa.
- Pengkategorian indikator otonomi desa tidak menggambarkan pola pada perubahan data yang digunakan. Hal ini tergambar pada perubahan indikator otonomi desa cenderung tidak signifikan secara statistik pada pengujian McNemar-Bowker test.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu kepala desa dan sekretaris desa menjadi acuan produktivitas pembangunan di desa. Penilaian kualitas melihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala desa dan sekretarisnya. Sebelum UU No. 6/2014 disahkan, sekretaris desa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun setelah UU ini berlaku, sekretaris desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa.

Tabel 11. Hasil Uji Indikator Sumber Daya Manusia (SDM)

Variabel	Keterangan	McNemar-Bowker	Wilcoxon
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Kualitas SDM Kepala Desa	+*	+*
	Kualitas SDM Sekretaris Desa	+*	+*

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018

Keterangan: * signifikan dengan alfa 0,01, ** signifikan dengan alfa 0,05

Keterbatasan:

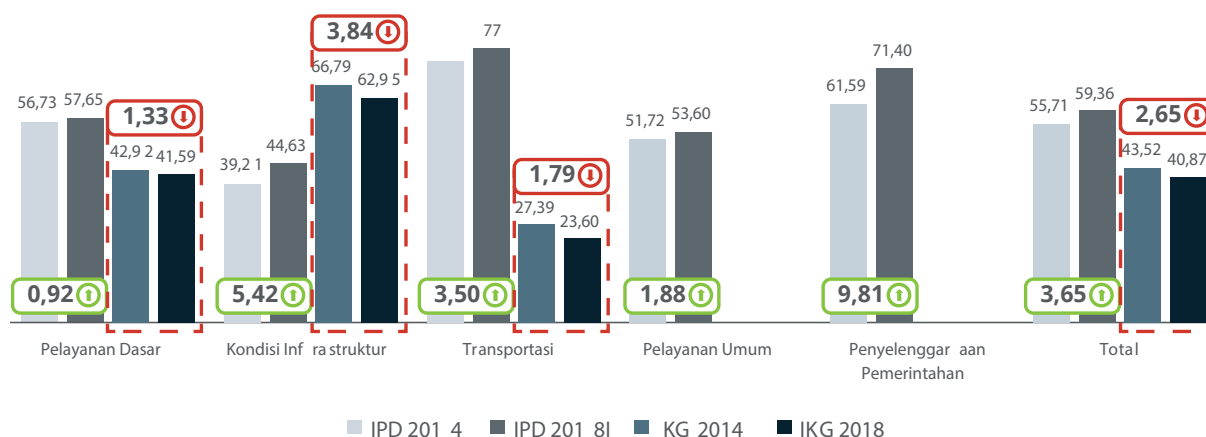
- Variabel kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat bergantung pada masyarakat pada saat pemilihan kepala desa.
- Kualitas SDM diukur dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala desa dan sekretaris desa.

6. Evaluasi Hasil Indeks

Indeks pembangunan desa (IPD) dan indeks kesulitan geografis (IKG) memiliki sudut pandang keterbalikan. IKG mencerminkan tingkat kesulitan warga dalam mencapai akses pelayanan dasarnya, sedangkan IPD mencerminkan capaian pembangunan desa untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada warga desa. IKG digunakan sebagai penentu pembagian Dana Desa, dan IPD digunakan sebagai evaluator hasil pembangunan desa.

Hasilnya, pembangunan desa berhasil menurunkan tingkat kesulitan geografis yang cukup tinggi pada dimensi infrastruktur. Meski demikian, kondisi infrastruktur masih memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nilai indeks kesulitan geografis (IKG).

Grafik 3. Perbandingan Hasil IPD dan IKG Per Dimensi



Sumber: Diolah dari nilai IPD 2018 dan IKG

Kondisi infrastruktur desa masih lebih baik dibandingkan kondisi dimensi pelayanan dasar dan transportasi. Ketika dibandingkan sekilas, dimensi IPD mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan IKG. Hal ini disebabkan oleh variabel indikator IPD yang lebih banyak yaitu 14 indikator, sedangkan IKG hanya memiliki 8 indikator. Indikator-indikator IPD yang membedakan adalah indikator penggunaan LPJ, jamban, dan keberadaan pos yang tidak tersedia dalam pengukuran IKG. Selain into, kontribusi setiap indikator juga memiliki pola yang berbeda.

Tabel 12. Penyebab Perbedaan Nilai IPD dan IKG Pada Dimensi Kondisi Infrastruktur

Keterangan	Perubahan	Indikator IKG	Indikator IPD
Akses ke bahan bakar	Desa yang ada pangkalan/agen/penjual LPG meningkat 14% dari 2014	Ya	Ya
Tempat buang air besar sebagian keluarga	Desa yang sebagian besar keluarganya menggunakan jamban sendiri meningkat 26% dari 2014	Tidak	Ya
Akses ke pengiriman pos atau barang	Desa yang memiliki layanan pos meningkat 59% dari 2014	Tidak	Ya
Kelompok pertokoan	Desa yang memiliki kelompok pertokoan turun 4,74% dari 2014	Ya	Ya
Pasar tanpa bangunan	Desa yang memiliki pasar tanpa bangunan turun 10,70% dari 2014	Ya	Ya
Warung/kedai makanan	Desa yang memiliki warung/kedai makanan turun 0,54% dari 2014	Ya	Ya

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018

Selain karena perbedaan indikator yang digunakan, kontribusi dari masing-masing indikator untuk menyusun IPD dan IKG pun berbeda. Kontribusi yang dihasilkan dari analisis komponen utama (PCA) pada tahun 2014 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 2.

KESIMPULAN

1. Hasil pengujian *McNemar-Bowker Test* dan *Wilcoxon*, menunjukkan beberapa indikator yang perubahannya tidak terlalu signifikan. Indikator tersebut dijabarkan di bawah ini:
 - a. Pola perubahan kategori ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA pada tahun 2014 dan 2018 tidak signifikan;
 - b. Pola perubahan kategori ketersediaan pertokoan, *minimarket* atau toko kelontong pada tahun 2014 dan 2018 tidak signifikan;
 - c. Pola perubahan kategori penanganan kejadian luar biasa (klb) pada tahun 2014 dan 2018 tidak signifikan;
 - d. Pola perubahan kategori otonomi desa pada tahun 2014 dan 2018 tidak signifikan; dan
 - e. Pola perubahan kategori aset/kekayaan desa pada tahun 2014 dan 2018 tidak signifikan.
2. Secara umum keberhasilan dalam pembangunan desa memerlukan sinergi upaya dari perangkat desa itu sendiri dan upaya dari pemerintah yang lebih tinggi dari pemerintah desa. Contohnya antara lain adalah pengadaan fasilitas sekolah dasar hingga menengah, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas, fasilitas jaringan menara pemancar sinyal (BTS) serta kekuatan sinyal itu sendiri, hingga kantor pos.
3. Saat menyusun indikator pembangunan desa yang melibatkan jarak dan kemudahan warga untuk mencapai fasilitas terdekat, ada indikasi desa sekitarnya juga terkena dampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, D.B. and J. Shrestha. 2013. "Economic Impact Of Microfinance In Nepal: A Case Study Of The Manamaiju Village Development Committee, Kathmandu." *Economic Journal of Development Issues* 15 & 16 (1-2).
- Antlöv, H., Wetterberg, L. Dharmawan. 2016. "Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52 (2): 1-42.
- Badan Pusat Statistik (Statistics Indonesia). 2018. "Village Development Index of 2018." Jakarta: BPS.
- 2014. "Village Potential Statistics of 2014." Jakarta: BPS.
- 2018. "Village Potential Statistics of 2018." Jakarta: BPS.
- Bappenas and Statistics Indonesia. 2015. "Village Development Index of 2014 – Challenges in Meeting the Village Minimum Service Standard." Bappenas and Statistics Indonesia.
- Boonperm, J., J. Haughton, and Khandker. 2013. "Does the Village Fund matter in Thailand? Evaluating the impact on Incomes and spending." *Journal of Asian Economics* 3–16.
- Breman, J. 2001. "The Impact of the Asian Economic Crisis on Work and Welfare in Village Java." *Journal of Agrarian Change* 1 (2): 242–282.
- Ebrahimi, M.S., A.M. Amini, and M. Hanif. 2014. "Socio-economic impact of rural development projects in Iran." *Spanish Journal of Rural Development* V (2): 77-84.
- Hair J.F., W.C. Black, B.J. Babin, and R.E. Anderson. 2010. "Multivariate Data Analysis."
- Jones, D., N. Nekbakhtshoev, and D. Spechler. 2016. "Collective Action for Rural Village Development." *Society for International Development* 1011-6370/16 - 58(2-3), 385–389.
- Lalira, D., A.T. Nakoko, and I.P.F. Rorong. 2018. "Impacts of Village Fund And Allocation of Village Fund on the Poverty Level in Gemeh Sub-district Talaud Islands Regency." *Efficiency Scientific Periodic Journal* 18 (4).
- Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. 2019. "2018 Performance Report of the Directorate General for Development and Empowerment of Rural Community (PPMD)." Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration.

Lampiran

LAMPIRAN 1

Tabel Hasil Uji Statistik McNemar- Bowker dan Wilcoxon

Indikator IPD 2018		McNemar- Bowker	Wilcoxon
Indikator	Keterangan		
I1	Ketersediaan dan Akses ke TK/RA/BA	+*	+
I2	Ketersediaan dan Akses ke SD Sederajat	+*	+*
I3	Ketersediaan dan Akses ke SMP Sederajat	+*	+*
I4	Ketersediaan dan Akses ke SMA Sederajat	+*	+*
I5	Ketersediaan dan Akses ke Rumah Sakit	+*	+*
I6	Ketersediaan dan Akses ke Rumah Sakit Bersalin	+*	+*
I7	Ketersediaan dan Akses ke Puskesmas	+*	+*
I8	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poliklinik/ Balai Pengobatan	+*	+*
I9	Akses ke Tempat Praktik Dokter	+*	+*
I10	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Tempat Praktik Bidan	+*	+*
I11	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poskes- des atau Polindes	+*	+*
I12	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Apotek	+*	+*
I13	Ketersediaan Pertokoan, Minimarket atau Toko Kelontong	+*	+
I14	Ketersediaan dan Akses ke Pasar	+*	+*
I15	Ketersediaan dan Akses ke Restoran, Rumah Makan atau Warung/Kedai Makan	+*	+*
I16	Akses ke Akomodasi Hotel atau Penginapan	+*	+*
I17	Ketersediaan dan Akses ke Bank	+*	+*
I18	Akses ke Energi Listrik	+*	+*
I19	Akses ke Penerangan Jalan	+*	+*
I20	Akses ke Bahan Bakar	+*	+*

Indikator IPD 2018		McNemar- Bowker	Wilcoxon
Indikator	Keterangan		
I21	Sumber Air Minum	+*	+*
I22	Sumber Air Mandi/Cuci	+*	+*
I23	Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga	+*	+*
I24	Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler	+*	+*
I25	Akses ke Pengiriman Pos atau Barang	+*	+*
I26	Lalu Lintas dan Kualitas Jalan untuk Transportasi Antardesa	+*	+*
I27	Aksesibilitas Jalan	+*	+*
I28	Ketersediaan Angkutan Umum	+*	+*
I29	Operasional Angkutan Umum	+*	+*
I30	Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi ke Kantor Camat	+*	+*
I31	Biaya Per Kilometer Transportasi ke Kantor Camat	+*	+*
I32	Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi ke Kantor Bupati/Walikota	+*	+*
I33	Biaya Per Kilometer Transportasi ke Kantor Bupati/Walikota	+*	+*
I34	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)	+*	+
I35	Penanganan Gizi Buruk	+*	+*
I36	Ketersediaan Fasilitas Olahraga	+*	+*
I37	Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga	+*	+*
I38	Kelengkapan Pemerintahan Desa	+*	+*
I39	Otonomi Desa	+	+*
I40	Aset/Kekayaan Desa	+*	+**
I41	Kualitas SDM Kepala Desa	+*	+*
I42	Kualitas SDM Sekretaris Desa	+*	+*

Sumber: Diolah dari, Statistik Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2018
Keterangan: * signifikan dengan alpa 0,01, ** signifikan dengan alpa 0,05

LAMPIRAN 2

Tabel Pembobot Masing-Masing Kontribusi Penyusun Indeks

Indikator	Nama Indikator	IKG	IPD
I1	Ketersediaan dan Akses ke TK/RA/BA	0.0345	0.0228
I2	Ketersediaan dan Akses ke SD Sederajat	0.0208	0.0116
I3	Ketersediaan dan Akses ke SMP Sederajat	0.0397	0.0321
I4	Ketersediaan dan Akses ke SMA Sederajat	0.0365	0.0317
I5	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Rumah Sakit	0.0409	0.0272
I6	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Rumah Sakit Bersalin	0.0392	0.0258
I7	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Puskesmas	0.0387	0.0310
I8	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poliklinik/Balai Pengobatan	0.0479	0.0309
I9	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Tempat Praktek Dokter	0.0454	0.0326
I10	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Tempat Praktek Bidan	0.0447	0.0299
I11	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Poskesdes Atau Polindes	0.0441	0.0252
I12	Ketersediaan dan Kemudahan Akses ke Apotek	0.0376	0.0254
I13	Ketersediaan Pertokoan, Minimarket atau Toko Kelontong	0.0298	0.0196
I14	Ketersediaan Pasar	0.0275	0.0180
I15	Ketersediaan Restoran, Rumah Makan atau Warung/Kedai Makan	0.0227	0.0152
I16	Ketersediaan Akomodasi Hotel atau Penginapan	0.0268	0.0186
I17	Ketersediaan dan Akses ke Bank	0.0240	0.0230
I18	Akses ke Energi Listrik	0.0300	0.0230
I19	Akses ke Penerangan Jalan	0.0308	0.0188
I20	Akses ke Bahan Bakar	0.0326	0.0178

Kertas Kerja - Indikator Pembangunan Desa di Indonesia:
Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa

Indikator	Nama Indikator	IKG	IPD
I21	Sumber Air Minum		0.0299
I22	Sumber Air Mandi/Cuci		0.0301
I23	Fasilitas Buang Air Besar		0.0137
I24	Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Komunikasi Seluler		0.0160
I25	Akses ke Pengiriman Pos atau Barang		0.0173
I26	Lalu Lintas dan Kualitas Jalan untuk Transportasi Antar Desa	0.0268	0.0174
I27	Aksesibilitas Jalan	0.0238	0.0150
I28	Ketersediaan Angkutan Umum	0.0653	0.0427
I29	Operasional Angkutan Umum	0.0648	0.0423
I30	Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi ke Kantor Camat	0.0294	0.0177
I31	Biaya Per Kilometer Transportasi ke Kantor Camat	0.0383	0.0280
I32	Waktu Tempuh Per Kilometer Transportasi ke Kantor Bupati/Walikota	0.0228	0.0142
I33	Biaya Per Kilometer Transportasi Ke Kantor Bupati/Walikota	0.0348	0.0265
I34	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)		0.0195
I35	Penanganan Gizi Buruk		0.0209
I36	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga		0.0335
I37	Keberadaan Kelompok Kegiatan Olah Raga		0.0352
I38	Kelengkapan Pemerintahan Desa		0.0260
I39	Otonomi Desa		0.0163
I40	Aset/Kekayaan Desa		0.0199
I41	Kualitas SDM Kepala Desa		0.0186
I42	Kualitas SDM Sekretaris Desa		0.0279

Sumber:

Penimbang IKG: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Penimbang IPD: Publikasi Indeks Pembangunan Desa 2018

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kantor Sekretariat Wakil Presiden
Jl. Kebon Sirih Raya No.14, Jakarta Pusat, 10110

Telpon : (021) 3912812
Faksimili : (021) 3912511
Email : info@tnp2k.go.id
Website : www.tnp2k.go.id

